

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN ENREKANG

DEVI CHANDRA NIRWANA¹, MUHAMMADIAH², MUHAJIRAH
HASANUDDIN³

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The study aims to know the role of government in the development of small and medium enterprises in the district of Enrekang. The kind of research that is used which is a qualitative with the type case studies. Source used in this study as many as nine people. Techniques of collecting the data used in research, the observation, interviews, and documentation. The results of this study shows that the government of Enrekang's role is a facilitator, regulator, and catalyst. Measures taken by the government of Enrekang, it's very helpful community in improving small and medium enterprise, there were some communities that have been able to grow its business, but the government of Enrekang still need to further improve the development of the business.

Keyword: role, the government, the founding UMKM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di kabupaten enrekang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang, sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha kecil menengah, sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mampu mengembangkan usahanya, tapi pemerintah kabupaten Enrekang masih perlu untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha.

Kata kunci: peran, pemerintah, pembinaan UMKM

PENDAHULUAN

Perekonomian yang berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki banyak kelebihan, mampu mendorong orang bekerja keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih tinggi. Dalam upaya membangun ekonomi nasional melalui sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam istilah sering disebutkan UMKM ataupun usaha kecil, maka pemerintah memberi perhatian yang sangat besar dan mendapatkan prioritas untuk pembinaan dan pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah Kota Enrekang adalah unsur SKPD (Satuan Kerja Pelaksana Daerah Pemerintah Kota) dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah Kota Enrekang mempunyai fungsi dalam

Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian serta Pembangunan di bidang koperasi termasuk UMKM.

Terkait dengan hal ini pemerintah kabupaten perlu memberi pembinaan, pembimbingan dan pendampingan, pelatihan, permodalan /pendanaan dan informasi yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan usaha agar usahanya lebih dinamis.

Penyuluhan dan pemberian informasi mengenai bagaimana mengelola usaha sangat diperlukan bagi mereka, namun hal ini juga masih sulit dilakukan. Untuk menstimulus pengusaha mikro agar menghasilkan produk yang tepat jumlah dan tepat kualitas diperlukan berbagai fasilitas seperti sarana atau peralatan dan modal yang memadai, namun pengelola usaha mikro yang ada di lokasi penelitian hampir semuanya kurang memiliki fasilitas yang memadai untuk itu keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengambil judul : “Peranan Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Mikro di Kabupaten Enrekang”.

Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Miftah Thoha, (1997). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan, memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Menurut Pranadjaja (2003) Gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah.

menurut pendapat Koswara (1994) menyatakan pemerintah adalah lembaga atau badan - badan publik yang mempunyai fungsi

melakukan upaya mencapai tujuan Negara. Sedangkan menurut Ermaya Suradinata (1998 : 6) menjelaskan pemerintahan adalah proses kegiatan penyelenggaraan atas tugas – tugas dan fungsi – fungsi dari pemerintah, sedangkan pemerintah merupakan suatu yang statis.

Menurut C.F.Strong dalam Simorangkir (2003: 15) bahwa pemerintah dalam arti luas sebagai aktifitas badan- badan publik yang terdiri dari kegiatan- kegiatan eksekutif, legislatif dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, beliau mengungkapkan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif.

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurutasas otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Gede Diva (2009 :15-18), dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Menurut Partomo (2004:2) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha baik di sektor tradisional maupun modern. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa usahamikro,kecil dan menengah merupakan usaha yang sangat besar peranannya dalam mendukung dalam perekonomian masyarakat, namun pengelolanya masih belum memiliki kapasitas sebagaimana yang diperlukan.

Pengusaha mikro, kecil dan Menengah pada umumnya dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan rendah dan melakukan usahanya secara tradisional.

Menurut Darwanto,(2008:22) beberapa alasan kuat mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja, adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan.Lokasi Usaha Kecil Menengah banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal.Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Alma, Buhari. (2004) beberapa pengertian usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari berbagai pendapat, antara lain: Pengertian usaha kecil berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK Tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset Rp. 60 juta (enam ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp. 600 juta.

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan; pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70.000.000(tujuh puluh juta) ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp. 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha Rumah tangga mempunyai: 1-5 tenaga kerja, (ii) Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, (iii) Usaha menengah: 20-29 tenaga kerja, (iv) Usaha besar: lebih dari 100 tenaga kerja.

Sedangkan dalam konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: (i) Asset Rp 50.000.000.000(lima puluh milyar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Omset Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.10/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal yaitu berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, dan usaha kecil tradisional yaitu usaha yang telah digunakan secara turun temurun, dan atau berkaitan dengan seni budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dua (2) bulan mulai bulan Agustus – bulan Oktober 2016. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Koperasi

Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan dorongan, fasilitas dan modal dalam membuat usaha Mikro di Enrekang Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertipe dasar fenomenologi yaitu, penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan dalam kaitanya dengan pembinaan usaha mikro kecil menengah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui observasi, wawancara secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan pembinaan Usaha Mikro di Enrekang Kabupaten Enrekang. (b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen berkaitan dengan obyek penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini secara purposivev atau sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui betul tentang

objek penelitian ini. Adapun jumlah informan adalah enam(6).

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu : observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun kedalam bentuk teks yang diperluas. Adapun tahapan/langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: pengumpulan data, reduksi data dan Sajian Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKUPERINDAG) adalah arah dan sasaran pergerakan diskuperindag dalam mewujudkan usaha kecil menengah bagi pedagang usaha dangke khususnya. Dalam hal ini peran pemerintah tersebut sangat perlu dalam pembinaan mikro sehingga dapat dirumuskan disesuaikan dengan kondisi

lingkungan dan pencapaian usaha dangke.

Tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tergantung. Fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Fungsi terakhir dari pemerintah adalah sebagai katalisator yaitu mempercepat terjadinya pertumbuhan perkembangan dari UMKM.

Peran pemerintah Sebagai Fasilitator adalah memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam

memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tergantung.

Peran pemerintah pemerintah dalam Bidang Pendampingan. Untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha, UMKM memerlukan pendampingan dalam hal manajemen usahanya. Pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan mengundang perguruan tinggi, korporasi atau organisasi lain baik dalam atau luar negeri untuk memberi bantuan dalam bentuk pendampingan usaha.

Hasil wawancara diatas dapat memberi pemahaman atau informasi bahwa pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM

(Usaha Mikro Kecil Menengah) yang menjadi domain atau tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang dinyatakan telah melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab sebagai pendamping UMKM, namun hasilnya masih belum maksimal.

Hal ini ditandai dengan lambannya perkembangan UMKM di Kabupaten Enrekang pada umumnya dan UMKM di lokasi penelitian ini. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang telah dengan konsisten menerapkan metode pendampingan yang sesuai petunjuk teknis dari lembaga yang kompeten yakni Dinas Koperasi dan UMKM di daerah tersebut.

Adapun beberapa penyebab kelambanan perkembangan UMKM di Kabupaten Enrekang adalah kurangnya tenaga dan keahlian tenaga pendamping dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang. Tenaga pendamping yang jumlahnya hanya 7 orang sangat tidak rasio atau sesuai dengan jumlah pengusaha UMKM dan luas wilayah kerjanya. Sehingga menurut AS

strategi pendampingan masih perlu diperbaiki, khususnya sumber daya manusia yang seharusnya ditambah personalianya agar dapat menjangkau pengusaha UMKM yang jumlahnya 1241 orang dan tersebar dalam 8 kecamatan dan 56 desa/kelurahan dalam wilayah administrasi atau wilayah Kabupaten Enrekang.

Peran pemerintah dalam Bidang Pendanaan dan Permodalan Disamping memberikan bantuan pendampingan pemerintah juga memprogramkan untuk memberi bantuan finansial kepada usaha UMKM. Tujuan pemberi bantuan permodalan dan pendanaan adalah untuk merekonstruksi usaha bisnis agar lebih produktif yang pada gilirannya mampu menjadi usaha yang kompetitif. Untuk bisa mencapai tujuan itu dana yang ada harus di distribusikan dengan tepat sasaran dan harus terhindar dari terjadinya penyimpangan dana bantuan.

Mulai dari pendataan, penaksiran, penyusunan rencana program, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi merupakan tugas pemerintah. Untuk itu koordinasi dan pengelolaan dana

bantuan dari pemerintah sangat diperlukan. Modal merupakan salah satu factor utama dalam menggerakkan kegiatan bisnis, tidak terkecuali pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tidak dapat disangkal bahwa masalah pendanaan atau permodalan inilah yang kendala dalam menjalankan aktivitas bisnis ditengah-tengah masyarakat. Hampir seluruh masyarakat ketika ditanya mengapa tidak bergerak dalam bidang usaha bisnis, jawabannya adalah tidak memiliki modal usaha. Sehingga menurut mereka, jika permodalan tersedia sudah tentu banyak anggota masyarakat akan masuk menjadi wirausaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan SG, AD dan DA selaku pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa dana yang merupakan kebutuhan utama untuk menjadi modal kerja dalam menjalankan usaha ternyata belum tersedia secara cukup memadai, padahal tanpa tersedianya modal dan pendanaan yang cukup tentu sulit rasanya untuk membesarkan usaha. Setiap usaha dalam bidang apapun hanya akan betumbuh dan

berkembang jika pemiliknya memiliki modal dan pendanaan yang cukup. Apalagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah seluruhnya memiliki modal yang kecil, karena itu usaha mereka sangat terbatas dan sulit bertumbuh.

Secara nasional jumlah permodalan untuk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk besar jumlahnya, namun jika dibandingkan jumlah pengusaha yang memerlukan modal kerja, maka jumlah dana tersebut masih jauh dari cukup. Khususnya modal atau pendanaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga dilihat dari aspek permodalan ternyata kurang mendukung pengembangan UMKM di daerah ini.

Memang modal kerja yang dikucur oleh Dinas Koperasi dan UMKM telah ada dan betul betul digunakan dalam hal membangun usaha UMKM dengan segala keterbatasannya. Pengusaha UMKM memang masih membutuhkan tambahan dana dari pemerintah Dinas

Koperasi dan UMKM agar pada suatu saat dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pengusaha.

Fasilitator di Bidang Pelatihan Dalam bidang pelatihan ini, pelaku UKM diarahkan pada proses produksi yang lebih profesional. Memanfaatkan sumberdaya dengan kualitas tinggi agar fokus pemasaran dan produksi dapat tercapai dengan mudah. Peningkatan *skill* sumber daya manusia yang dilakukan pada pelatihan ini bertujuan agar fokus produksi dan penjualan berjalan konsisten terhadap produk yang dihasilkan. Dinas Koperasi dan UKM Entekang melakukan upaya peningkatan sumber daya dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebagai syarat UKM dapat dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM. Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia.

Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan UKM mereka. Pada dasarnya,

pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang.

Menurut Informan dalam sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penyelenggaraan pelatihan untuk pelaku UMKM masih perlu diintensif baik waktu maupun materi pelatihannya. Secara umum pelaku UMKM yang minim pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam manajemen UMKM, sehingga sangat mendambakan tambahan pengalaman mengelola UMKM melalui pelatihan yang diselenggarakan secara sistematis dan kontinu. Pelaku UMKM hanya mungkin mampu mengembangkan usahanya jika ada keterlibatan secara aktif lembaga pemerintahan yang kompeten secara teknis dan pengalaman Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di daerah masing-masing.

Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan pembinaan dan pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut

dimaksudkan untuk mempermudah usaha UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Pembuatan kebijakan untuk kegiatan usaha Mikro memang sangat diperlukan, mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan. Karena itu khususnya mengenai usaha mikro di Kabupaten Enrekang pemerintah daerah dalam, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM telah melahirkan produk kebijakan untuk menjadi landasan dan pedoman dalam mengembangkan usaha mikro di daerah ini.

Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha melalui produk kebijakannya dengan harapan kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan usaha yang tetap kondusif.

Kebijakan yang sangat diperlukan oleh pengusaha mikro agar mudah melakukan investasi adalah dengan mengatur dan menetapkan suku bunga pinjaman modal usaha maupun pembuatan kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pembuatan

kebijakan yang terkait dengan UMKM adalah menjadi domain dan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah selain memiliki kewajiban, tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan juga pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Hasil wawancara atau pernyataan yang dikemukakan oleh HR selaku perwakilan pegawai pemerintahan dan RD selaku Kepala Bidang UKM Enrekang ini dapat kita lihat bahwa dalam menjalankan usaha Mikro pengusaha sangat mudah dalam menjalankannya dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mudah diterapkan dan dipatuhi.

Peran pemerintah sebagai katalisator Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi Fast Moving Enterprise, yaitu UMKM yang

telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Seperti halnya sebuah katalis pemerintah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut, namun tidak terlibat dalam mengatur proses keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah dalam keseluruhan proses tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak secara alami.

Peran pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Masalah UMKM, bukan hanya masalah pemerintah tetapi juga masalah masyarakat. Sehingga kedua komponen bangsa ini diperlukan keterlibatannya agar masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.

Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek

dalam kaitannya dengan UMKM, sementara pemerintah memiliki kompetensi yang memadai, baik mengenai teori maupun praktek dalam pengelolaan UMKM. Karena itu, selaku pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah berkepentingan menjadi katalisator yang efektif dan efisien.

Hasil wawancara dengan kedua tokoh masyarakat terkait dengan peran pemerintah sebagai katalisator pada prinsipnya dapat dianggap telah membantu para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah ini, dan hal semacam ini merupakan indikasi telah bahwa peran pemerintah selaku katalisator yang efektif dan bermanfaat dalam mengembangkan UMKM. Namun diakui juga bahwa peran pemerintah sebagai katalisator masih perlu ditingkatkan, agar pengusaha UMKM lebih banyak menyerap informasi mengenai bagaimana UMKM di masa yang akan datang.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas terkait dengan teori

Dede Difa yaitu peran Pemerintah sebagai Katalisator yang digunakan dalam penelitian Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan teori yang di terapkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam pembinaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Enrekang maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

Peran pemerintah sebagai fasilitator, (a) pendampingan, (b) pendanaan, (c) permodalan serta (d) pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggap telah berlangsung dengan baik, namun tetap diakui bahwa ketiga hal tersebut masing-masing masih memerlukan perbaikan.

Peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini pembuatan dan penerapana kebijakan atau aturan yang terkait dengan kegiatan UMKM oleh pemerintah dianggap sudah ada dan telah dijalankan, namun juga disadari bahwa masalah regulasi untuk UMKM perlu dibuat

lebih banyak aturan yang dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM.

Peran pemetintah sebagai katalisator oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggap telah berjalan dengan baik, karena lembaga ini telah memberikan arahan kepada UMKM yang ada dalam wilayah kerjanya.

Adapun tanggapan tokoh masyarakat mengenai regulasi dalam rangka pembinaan UMKM juga dinilai sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih membantu UMKM dalam meningkatkan kinerjanya. Sementara itu, penilaian pelaku terhadap peran pemerintah sebagai katalisator yang terkait dengan pelaku UMKM dianggap sudah berlangsung dengan baik dan tentu saja juga masih memiliki kelemahan yang harus diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buhari. 2004. *Kewirausahaan*. Balai Pustaka. Bandung.
- Darwanto. 2008. *Mengelola Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Grajafindo, Jakarta.

Gede, Diva: 2009 *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*
Bakrie School of Management :
Jakarta

Koswara, E. *Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat*. Yayasan Pariba. Jakarta. 1994

Partomo.2004. *Menjadi Wirausaha yang Handal, Konsep dan Strategi*.Gunung Agung. Jakarta

Pranadjaja. 2003.*Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Alumni. Bandung

Thoha , Miftha .1997 .*Pembinaan Organisasi (Proses diagnosa dan intravuenasi)*

Simorangkir.J.S.T. 1997)*Sistem Pemerintahan Indonesia*.Gramedia, Jakarta

Strong, C.F. 2009. *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi*. Bumi Akasara. Jakarta.

Sudarta, Ermayana. 1998. *Mengelola Pemerintahan yang berkemajuan*. Gunung Agung, Jakarta.